



LAPORAN LKJIP

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



20
25



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2025 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah, tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah	1
I.2. Data	2
I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	9
II.2. Rencana Kerja Tahunan	11
II.3. Indikator Kinerja Utama	11
II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	24
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah	26
III.4. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel I.2.1	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan/Kepangkatan	2
Tabel I.2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Jenis Kelamin	4
Tabel I.2.3	Data Pegawai Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Tingkat Pendidikan	4
Tabel I.2.4	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan ASN	5
Tabel I.2.5	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan PPPK	5
Tabel I.2.6	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan PPPK Paruh Waktu	6
Tabel II.1.	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026	11
Tabel II.2.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	12
Tabel II.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	13
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	18
Tabel III.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2025	21
Tabel III.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2025	22
Tabel III.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2025	23
Tabel III.5.	Tingkat Pencapaian Tujuan Srategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	23
Tabel III.6.	Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini merupakan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk mencapai kinerja utama daerah sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sudah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2025. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran Perangkat Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target nilai 3.30 (Baik) terealisasi dengan nilai 3.04 (Baik) dengan mendapat predikat Berhasil;
2. Predikat Keterbukaan Informasi Publik, dengan target Informatif dapat terealisasi Menuju Informatif dengan predikat Tidak Berhasil;
3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
5. Nilai SAKIP OPD, dengan target predikat B terealisasi B dengan predikat Berhasil;
6. Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data, dengan target 58 instansi terealisasi 58 instansi, dengan predikat Berhasil;
7. Persentase informasi daerah yang diamankan, dengan target 100% terealisasi 100%, dengan predikat Berhasil;

Sementara itu capaian keuangan dari target Rp.8.291.691.788,88 terealisasi Rp.8.048.466.286,00 atau sebesar 97,07 % dengan predikat kinerja keuangan Tinggi.

Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan kolaborasi untuk penerapan integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan publik, tata Kelola dan manajemen SPBE, penyelenggaraan audit dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, literasi digital dan pengembangan layanan Smart Village serta peningkatan kualitas data dan publikasi kinerja daerah.

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.2 Data

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 45 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut:

REGISTER PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

31 Desember 2025

Table 1.2.1

No	Nama/NIP/NIPPPK	L/P	Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir	KET
1	Drs. H. MUHAMAD 196512311989031209	L	IV/c	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	S1	
2	SUNARNO, S. Sos, MM 197212291994021001	L	IV/a	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	S2	
3	LALU AGUS MAHYUDI, ST 197408172002121014	L	IV/a	Kabid Bidang APTIKA	S1	
4	H. ISWANDI KHAIRY RAMEN, S. IP, M. Han 198503222008031001	L	IV/a	Kabid Bidang PIKP	S2	
5	LALU ISHAK, S. Sos 197010121997031002	L	IV/a	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	S1	
6	JONI MILIAN HAKIM, S. IP 197206121994021004	L	III/d	Statistisi Ahli Muda	S1	
7	NINUK SILVIA, SE 197809242010012006	P	III/d	Perencana Ahli Muda	S1	
8	RAHMAWATI DIAN A, ST 198407122008032001	P	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	
9	AKHDIYAT FAHRONY MAHSUN, ST, M.A.P.M 198503172009011003	L	III/d	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	S2	
10	MULIA ALI AKBAR, S. Pd 198509142009011004	L	III/d	Analisis Berita	S1	
11	NURMAH, S. Kom 198712252011012016	P	III/d	Analisis Sistem Informasi	S1	
12	SURATMAN ISKANDAR, S.T.P 197611232008011011	L	III/c	Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	S1	
13	BAIQ RUSTIATI 196812311992032081	P	III/b	Pengolah Daftar Gaji	SMA	
14	LALU MUHAMMAD NATSIR, A. Md 197508242009011003	L	III/b	Pengelola Data	DIII	
15	ANJAR SISWARA, S.S.T 197707042005011011	L	III/b	Analisis Konten Media Sosial	S1	
16	RIJALUL KHAIRI, SE 197708072014071005	L	III/a	Pengadministrasian Kepegawaian	S1	
17	LALU AGUNG ABDUL AZIZ, S. Kom 198906172019031004	L	III/a	Pengelola Teknologi Informasi	S1	
18	RAHAYU AGUSTIANI, S. Si. 199008172022032001	P	III/a	Analisis Statistik	S1	
19	WAHYU SOFYANTI DEWI, S. Kom 199409102020122016	P	III/a	Analisis Sistem Informasi	S1	
20	HIKMAWATI, S. Mat. 199706302022032009	P	III/a	Analisis Statistik	S1	
21	LALU ABDUL MANAP, A. Ma 197809142009011003	L	III/a	Pranata Teknologi Informasi Komputer	DIII	
22	FATHURROHMAN, A. Md 198504192019031002	L	II/d	Pengelola Sistem dan Jaringan	DIII	
23	YUANITA ROHMAYANTI, A. Md 198506122019032006	P	II/d	Bendahara Pengeluaran	DIII	
24	RIZKI EKA SETIA, A. Md 198905232020121006	L	II/c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	DIII	
25	BAIQ MIDARNI WATI, S. Kom 198209232024212003	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
26	MUTIAH ARIFIN, S. Kom 198303052024212002	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	

27	BAIQ TUTI RUMLASARI, S. Kom 198604062024212003	P	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
28	M. LUKMAN HAKIM, S. Kom 199601082024211001	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	
29	LALU HERY SUPRIADI, A. Md 198809012024211006	L	VII	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	DIII	
30	LALU ZULHAM WIDYATMAJA, ST 199110192025211023	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	S1	
31	TAUFIK HIDAYAT, S.Kom 199605262025211024	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	S1	
32	BQ. DIAH NUR INDAH SARI, ST 198708152025212026	P	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	S1	
33	LALU DEDI KURNIAWAN, ST 198004012025211015	L	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	S1	
34	SYAM BASRI KHALID, S.Kom 199210162025211024	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Aplikasi Informatika	S1	
35	SAMSUL ARI PUTRA, S.Kom 199402042025211025	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Aplikasi Informatika	S1	
36	ROBY SUKMANA, S.Kom 199003212025211028	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	S1	
37	MUHAMAD ERWIN SEPTIAWAN, S.Kom 199309212025211023	L	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	S1	
38	MARGA IBRAHIM 198403182025211022	L	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sekretariat	SMA	
39	MOH. IRSAD AFIFI 198903312025211017	L	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sekretariat	SMA	
40	SAMSI HARIONO 198612312025211061	L	V	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sekretariat	SMA	
41	M. ARIF BUDIMAN S.Kom 199203182025211119	L	-	Penata Layanan Operasional	S1	
42	KHAIRUL KAHPI, S.Kom 199911052025211058	L	-	Penata Layanan Operasional	S1	
43	EKA SUCI LESTARI, A.Md 198505022025212129	P	-	Pengelola Layanan Operasional	DIII	
44	BQ. SILFIA AGUSTINA 198808042025212115	P	-	Pengelola Layanan Operasional	SMA	
45	MAHRUP 199012222025211115	L	-	Pengelola Layanan Operasional	SMA	

Sumber: Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

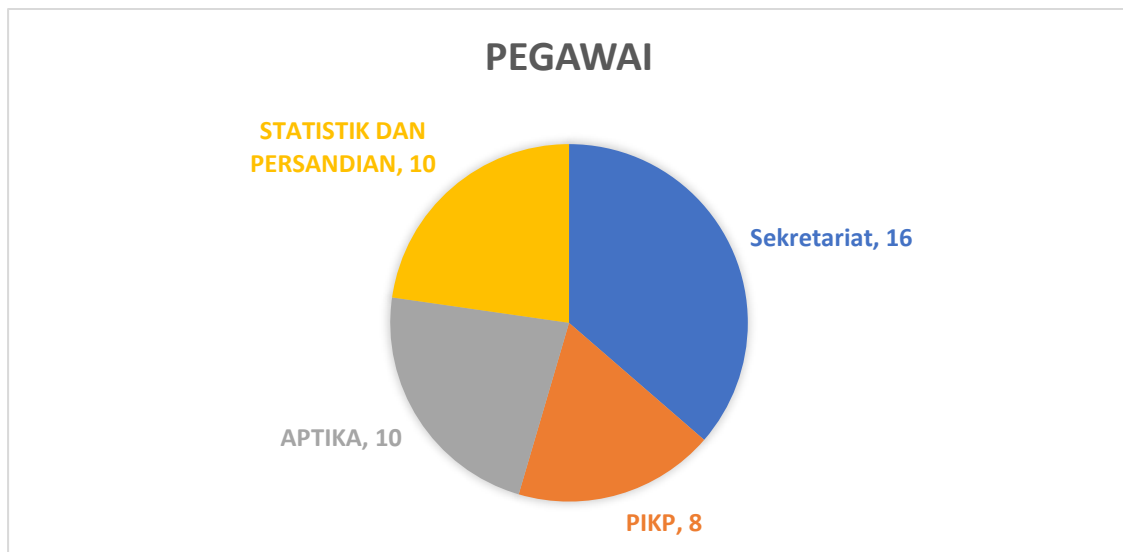
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan golongan per 31 Desember 2025:

a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Jenis Kelamin**

Tabel 1.2.2
Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	10	6
3	Bidang APTIKA	6	4
4	Bidang PIKP	6	2
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN	8	2
Jumlah		31	14

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

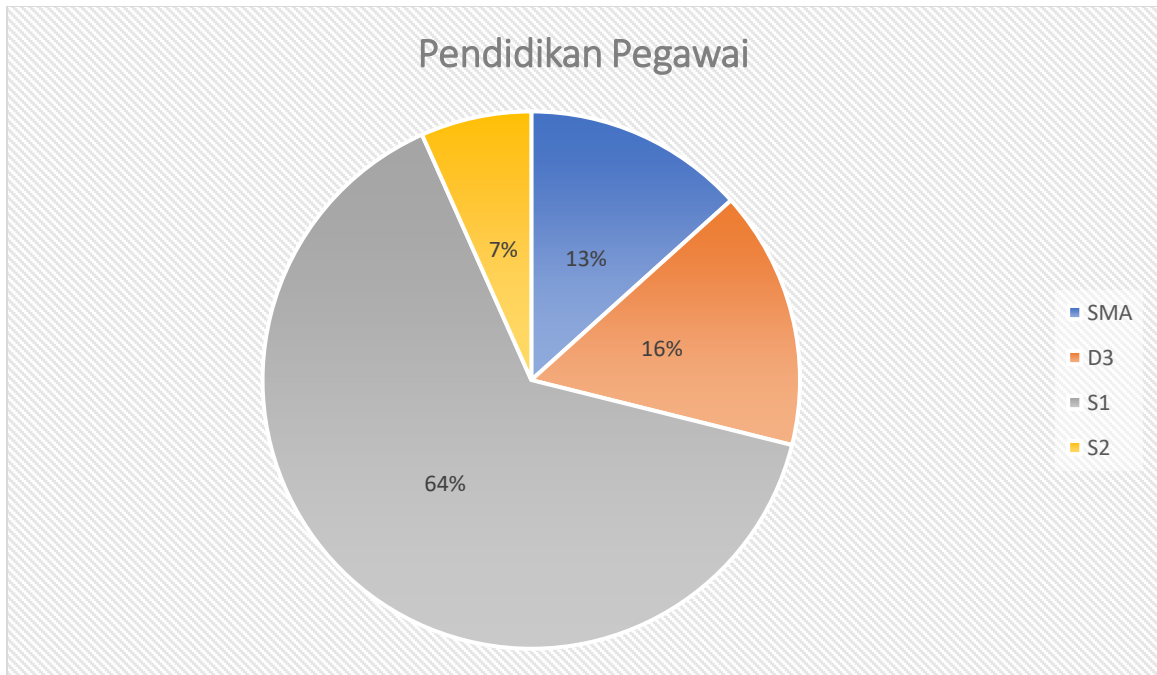


b. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Jenis Pendidikan**

Tabel 1.2.3
Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2
1	Kepala Dinas							1	
2	Sekretariat		6			5		4	1
3	Bidang APTIKA					1		9	
4	Bidang PIKP							7	1
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN					1		8	1
Jumlah			6			7		29	3

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

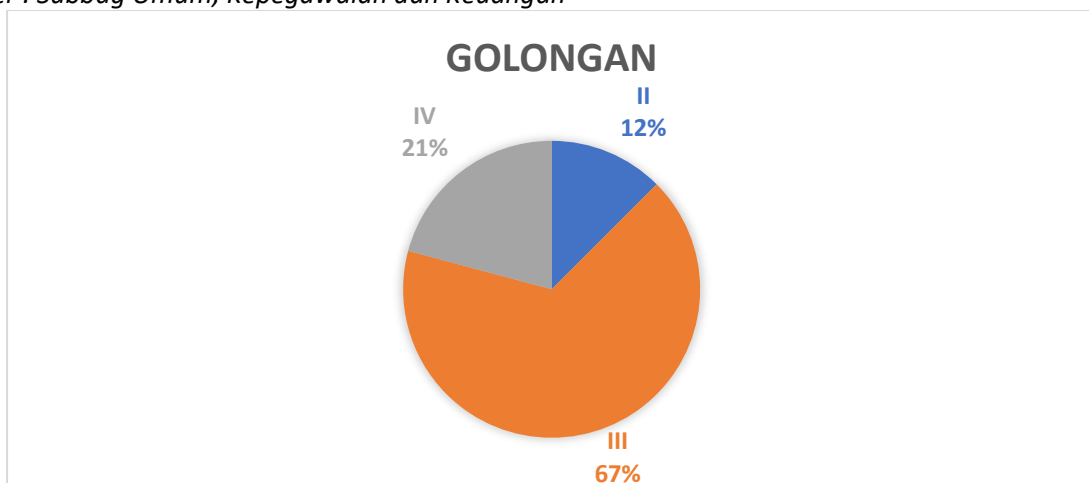


c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Golongan**

Tabel 1.2.4
Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan PNS			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretariat		2	6	1
3	Bidang APTIKA		1	2	1
4	Bidang PIKP			2	1
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN			6	1
Jumlah			3	16	5

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

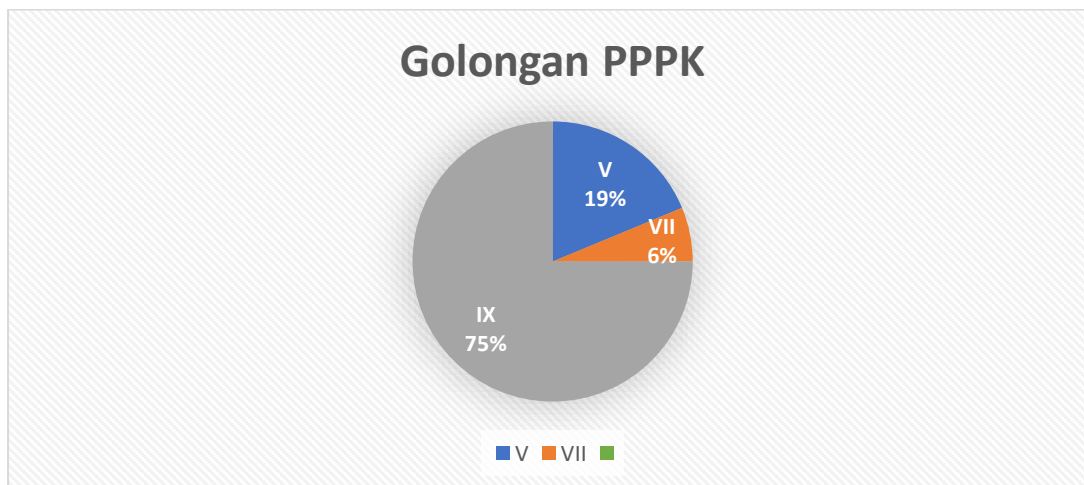


d. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Golongan (PPPK)**

Tabel 1.2.5
Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan PPPK				
		V	VII	VIII	IX	X
1	Kepala Dinas					
2	Sekretariat	3	1			
3	Bidang APTIKA				5	
4	Bidang PIKP				5	
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN				2	
Jumlah		3	1		12	

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan



e. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Golongan (PPPK Paruh Waktu)**

Tabel 1.2.6
Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	PPPK PW
2	Sekretariat	3
3	Bidang APTIKA	1
4	Bidang PIKP	0
5	Bidang STATISTIK & PERSANDIAN	1
Jumlah		5

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

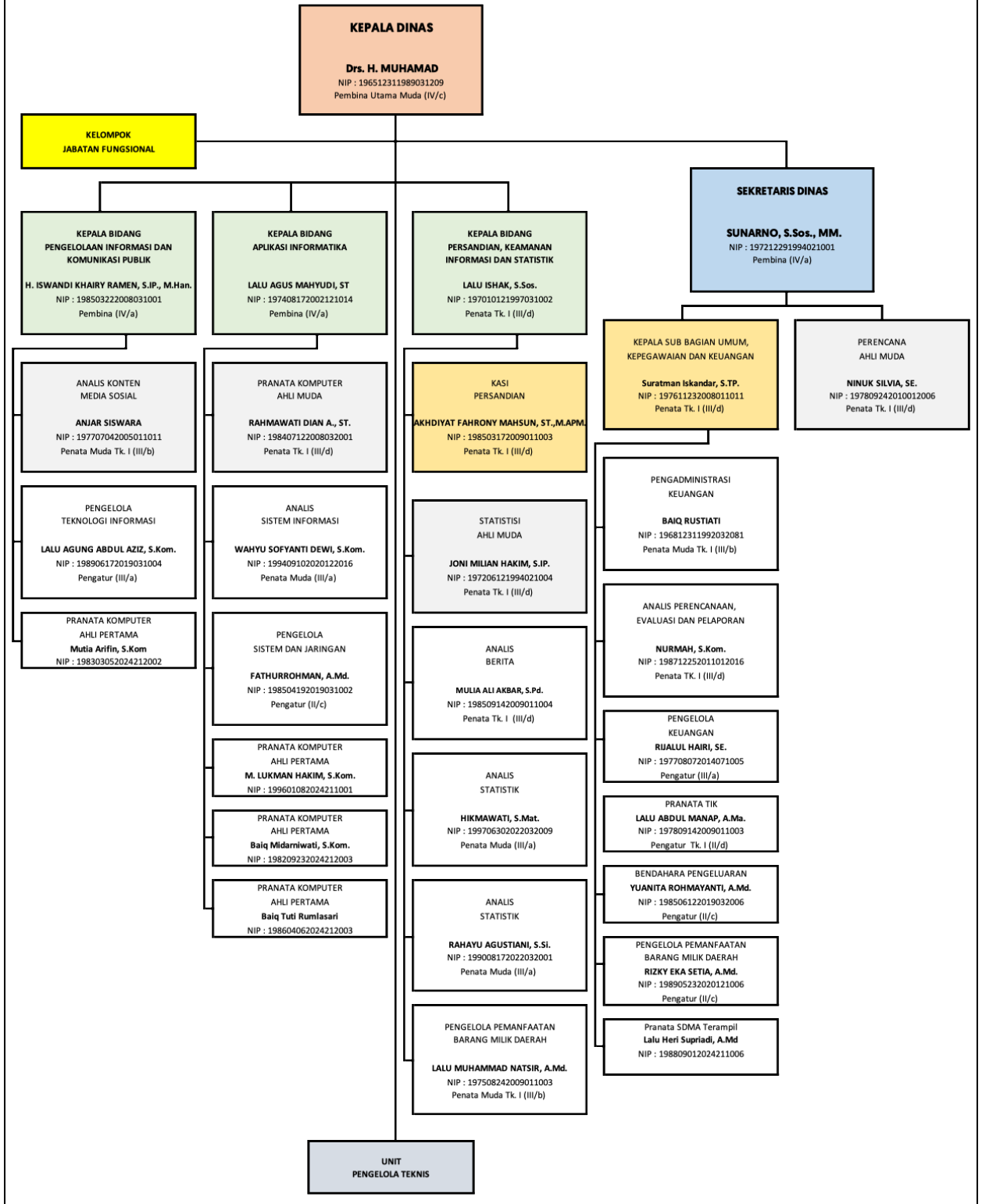
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Staff
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - a) Kabid PIKP
 - b) Staff
 2. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, membawahi:
 - a) Kabid Aptika
 - b) Jabatan Fungsional
 - c) Staff
 3. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian, membawahi:
 - a) Kabid Statistik dan Persandian
 - b) Kasi Persandian
 - c) Jabatan Fungsional
 - d) Staff

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan sedangkan untuk MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam Misi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ke 3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**.

Oleh karna itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Dinak Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan**, tentunya hal itu dapat diwujudkan dengan adanya sasaran-sasaran yang harus tercapai, berikut rencana strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel II.1.
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Misi III : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.			
Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Domain Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peningkatan Sistem Layanan Informasi Publik - Penyusunan regulasi daerah beserta petunjuk teknis terkait pelaksanaan SPBE dan Smartcity 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik - Peningkatan Keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dari sisi perangkat keras maupun SDM
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE		
	Nilai Domain Manajemen SPBE		
	Nilai Domain Layanan SPBE		

		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengelolaan informasi dan diseminasi informasi publik. - Peningkatan pemanfaatan layanan Sistem LAPOR. - Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Utama dan PPID OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik - Peningkatan pelayanan publik pemerintahan yang berbasis elektronik
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah - Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan Lombok Tengah Satu Data - Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah. - Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyusunan regulasi daerah terkait persandian dan keamanan informasi	Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan informasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Perencanaan Kinerja yang Berkualitas - Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) - Penguatan Pengukuran dan Monitoring Kinerja - Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja - Integrasi SAKIP dengan Penganggaran - Penguatan Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SAKIP - Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang terintegrasi - Penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah - Peningkatan akuntabilitas pengukuran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah - Penguatan keterkaitan antara kinerja dan penganggaran - Optimalisasi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Berikut adalah rincian penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel II.2.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja (2025)
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,7
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B

II.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel II.3.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan	
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, layanan, dan penerapan	Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 : INDEKS SPBE = $\sum NDj \times BDj$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan

Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan				teknologi informasi di pemerintahan. Indeks ini dinilai berdasarkan komponen-komponen utama yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).	$-BD_j = \text{Bobot Domain ke-j}$ $\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{BD_i} \sum N_{Ai} \times B_{Ai}$ Keterangan : - BDi = Bobot Domain ke-i - NAI = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAI = Bobot Aspek ke-i $\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{BA_k} \sum N_{ik} \times B_{ik}$ Keterangan : - BAK = Nilai Bobot Aspek ke-k - NIK = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BIK = Nilai Bobot indikator ke-k	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra).	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk evaluasi dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
	Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup audit keamanan, implementasi kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko informasi	Jumlah Komponen Keamanan Informasi yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan Informasi yang dinilai di kali 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Arah kebijakan peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah pedoman kebijakan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja Perangkat Daerah agar akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil sesuai prinsip SAKIP.	Nilai SAKIP PD = $\sum(\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})$	Dinas Kominfo

II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang di sahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
4. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 seperti tabel di bawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMAD**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LALU PATHUL BAHRI, S.IP., MAP.**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 15 Januari 2025

Pihak Kedua

LALU PATHUL BAHRI, S.IP., MAP.

Pihak Pertama

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
2.	Meningkatnya Implementasi SPBE	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3.2
3.	Pengelolaan Informasi Publik Yang Transparan dan Akurat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani Melalui PPID dan SP4N LAPOR	90 %
4.	Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah	Jumlah Informasi Publik Yang Dipublikasikan Melalui Media	2.016 Informasi/Berita
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Lombok Tengah	Nilai EPS Pemerintah Daerah	3.0
6.	Direktif Pimpinan	Prosentase Tindak Lanjut Arahan Pimpinan Yang Terlaksana	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.840.016.725	DAU
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.439.883.000	DAU
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.306.688.366	DAU
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	162.636.133	DAU
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.359.250	DAU
TOTAL		8.874.583.474	

Pihak Kedua,

H. PATHUL BAHRI, S.IP., MAP.

15 Januari 2025
Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,70
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Lombok Tengah	- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah	100%
		- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.311.619.087,92	DAU
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.535.976.094	DAU
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.280.082.256	DAU
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.828.833	DAU
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.149.818	DAU
TOTAL		8.254.656.090,92	

Pinak Kedua,

LALU PATRI BAHRI, S.IP., MAP.

Praya, 18 Oktober 2025
Pinak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	MUHAMAD		1	NAMA	LALU PATHUL BAHRI, S.IP		
2	NIP	196512311989031209		2	NIP	-		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	-		
4	JABATAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		4	JABATAN	BUPATI		
5	UNIT KERJA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5	UNIT KERJA	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH		
HASIL KERJA								
NO		RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF	
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	
UTAMA								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Penugasan dari Atasan Langsung)			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Penguatan Internal		
2	Tersedianya Kebijakan SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung)			Realisasi Penyerapan Anggaran	90% - 100%	Anggaran		
3	Meningkatnya Tata Kelola SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung)			Nilai Domain 1 Kebijakan SPBE	3.00	Penerima Layanan		
4	Meningkatnya Manajemen SPBE (Penugasan dari Atasan Langsung)			Nilai Domain 2 Tata Kelola SPBE	3.00	Penerima Layanan		
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Penugasan dari Atasan Langsung)			Nilai Domain 3 Manajemen SPBE	2.00	Penerima Layanan		
6	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Penugasan dari Penugasan dari atasan langsung)			Persentase direktif pimpinan yang terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan	100%	Penguatan Internal		
				Nilai Domain 4 Layanan SPBE	3.50	Penerima Layanan		
TAMBAHAN								
PERILAKU KERJA								
1	Berorientasi Pelayanan						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 							
2	Akuntabel							
PERILAKU KERJA								
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
3	Kompeten						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 							
4	Harmonis						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 							
5	Loyal						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 							
6	Adaptif						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 							
7	Kolaboratif						Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 							



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas, cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja. Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kesehatan. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement).

A. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran ini mean setiap kategori ditetapkan dengan penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut

$$\text{capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk setiap Katagori} \times \text{Nilai setiap Katagori}}{\text{Jumlah indikotor kinerja sasaran}} \times 100\%$$

2. Capaian Indikator Utama dan Program Tahun 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Pencapaian indikator kinerja utama dan program Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan pada tabel 3.2.1 berikut :

Table 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan public yang optimal	Indeks SPBE	Point	3.04	3.04	100%	3.13
		Meningkatkan pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Persentase	100%	100%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah.	Persentase	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan keamanan informasi melalui tata Kelola persandian yang baik	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata							100%	Kriteria : sangat tinggi

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk realisasi pencapaian dari target yang sudah tercapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun berjalan adalah sebesar **3,04**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai **100%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	%	Reliasasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Index SPBE	Nilai	3.04	3,04	100%	3.04	3,17	Hasil Asesment Tim Penilai SPBE Nasional

Capaian indeks SPBE tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik melalui penerapan berbagai kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indeks SPBE antara lain:

1. Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE, melalui penyusunan regulasi, pedoman, serta kebijakan internal terkait implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
2. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, yang mendukung proses administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan manajemen kinerja.
3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk jaringan, pusat data, serta sistem keamanan informasi untuk mendukung operasional layanan digital pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang mengelola dan mengoperasikan sistem informasi pemerintahan.

Perbandingan dengan Capaian Nasional dan Provinsi

Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional dan provinsi, posisi indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Wilayah	Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Lombok Tengah	3,04
Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56
Nasional	3,14

Berdasarkan tabel tersebut, nilai indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai target kinerja daerah, namun masih sedikit berada di bawah rata-rata nasional sebesar 3,14 serta capaian Provinsi NTB sebesar 3,56.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas penerapan SPBE agar dapat lebih mendekati bahkan melampaui capaian nasional maupun provinsi.

Analisis dan Tantangan

Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan indeks SPBE antara lain:

1. Integrasi sistem aplikasi pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan agar berbagai aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah dapat saling terhubung dan berbagi data secara optimal.
2. Penguatan manajemen layanan SPBE, termasuk pengelolaan layanan digital yang lebih terstandar dan terintegrasi.
3. Peningkatan keamanan informasi dan manajemen risiko teknologi informasi, sebagai bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan SPBE yang andal dan terpercaya.
4. Penguatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi, agar pengelolaan dan pengembangan sistem SPBE dapat dilakukan secara lebih optimal.

Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian indeks SPBE di masa yang akan datang, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan integrasi aplikasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik antar perangkat daerah.
2. Memperkuat implementasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE daerah.
3. Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.
4. Memperkuat keamanan informasi dan pengelolaan pusat data pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPBE melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

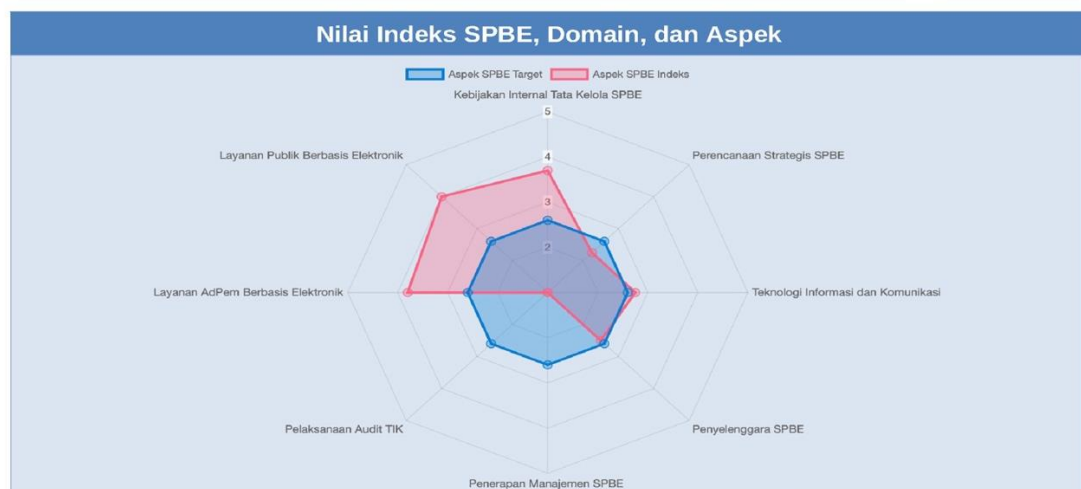
Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Tengah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital.

Adapun hasil penilaian terkait dengan Target SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH

3,04

(Baik)



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,04
Domain Kebijakan SPBE	3,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

Foto Kegiatan Pembentukan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika



❖ Fungsi SPBE di Diskominfo

1. Koordinasi dan Kebijakan

- Menyusun kebijakan teknis terkait tata kelola SPBE, seperti penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- Mengoordinasikan penerapan SPBE lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sistem berjalan terintegrasi.

2. Pengelolaan Infrastruktur

- Mengelola data center atau pusat data pemerintah daerah.
- Menyediakan jaringan komunikasi data, seperti jaringan intranet pemerintah (JIP), VPN, atau jaringan fiber optik.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

- Mengembangkan aplikasi layanan publik dan internal pemerintahan berbasis elektronik, seperti sistem keuangan, kepegawaian, atau layanan perizinan.
- Mengelola portal SPBE dan sistem SSO (Single Sign-On) untuk mengintegrasikan aplikasi yang ada.

4. Keamanan Informasi

- Melakukan pengawasan terhadap keamanan informasi, termasuk pencegahan serangan siber dan pengelolaan risiko.

- Memastikan aplikasi dan data memiliki standar keamanan yang sesuai, seperti penggunaan sertifikat elektronik dan enkripsi.
5. Pelayanan Data Terpadu
 - Mengelola integrasi data antar OPD untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - Mengimplementasikan konsep *big data* dan *data analytics*.
 6. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Menyelenggarakan pelatihan terkait SPBE bagi pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi.
 - Mendorong kolaborasi antara tim teknis SPBE dan OPD pengguna.
 7. Evaluasi dan Monitoring
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap indeks SPBE di tingkat pemerintah daerah.
 - Mengelola sistem pelaporan elektronik untuk pemantauan implementasi SPBE.

❖ Implementasi SPBE di Diskominfo

1. Portal SPBE: Sebagai pintu masuk ke berbagai aplikasi pemerintahan, portal ini mengintegrasikan layanan publik dan administrasi internal.
2. SSO (Single Sign-On): Memberikan akses terpusat bagi pengguna ke berbagai aplikasi dengan satu autentikasi.
3. Aplikasi Srikandi: Mendukung tata kelola arsip berbasis elektronik.
4. Pengelolaan Jaringan: Mendukung kebutuhan jaringan seperti intranet pemerintah daerah dan internet publik di fasilitas umum.
5. Call Center dan Pengaduan Publik: Layanan seperti Call Center 112 mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan atau meminta bantuan.

❖ Dampak Penerapan SPBE

1. Peningkatan Pelayanan Publik: Warga dapat mengakses layanan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan.
2. Efisiensi Pemerintahan: Mengurangi redundansi data dan mempermudah koordinasi antar OPD.
3. Keamanan dan Keandalan: Data yang terkelola dengan baik dan aman meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Peningkatan Indeks SPBE: Implementasi yang optimal membantu daerah mencapai target indeks SPBE yang lebih baik sesuai arahan pemerintah pusat.

2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah telah mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan dapat dikategorikan sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), maupun dokumen perencanaan tahunan lainnya. Pemanfaatan data statistik tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data (*evidence-based planning*).

Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah yang mendorong penggunaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Koordinasi dan pembinaan statistik sektoral kepada Perangkat Daerah sehingga meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Ketersediaan sistem informasi dan portal data daerah, yang memudahkan Perangkat Daerah dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik sektoral.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pada Perangkat Daerah melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan data statistik.

Dengan tercapainya indikator ini secara optimal, maka pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah.

Perbandingan dengan Target Nasional dan Provinsi

Jika dibandingkan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi, capaian indikator ini juga telah sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia.

Secara umum:

- Tingkat Nasional mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menekankan penguatan statistik sektoral dan integrasi data melalui implementasi kebijakan Satu Data Provinsi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan capaian 100%, kinerja indikator ini telah menunjukkan keselarasan bahkan memenuhi target yang diharapkan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik.

Permasalahan dan Tantangan

Meskipun capaian indikator telah mencapai target maksimal, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Kualitas dan konsistensi data statistik sektoral yang perlu terus ditingkatkan agar data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar valid dan mutakhir.
2. Kapasitas pengelola data di Perangkat Daerah yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data statistik.
3. Integrasi sistem data antar perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan agar data dapat digunakan secara terpadu.

Upaya Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral di setiap Perangkat Daerah.
2. Mengembangkan integrasi sistem data daerah melalui penguatan implementasi Satu Data Daerah.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data melalui pelatihan dan bimbingan teknis statistik sektoral.
4. Mendorong pemanfaatan portal data daerah sebagai sumber data utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan langkah tersebut diharapkan pemanfaatan data statistik tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat, terukur, dan berbasis data.

- 3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dan dapat dikategorikan sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Data statistik digunakan dalam berbagai dokumen evaluasi pembangunan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi capaian kinerja perangkat daerah, serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif, terukur, dan berbasis bukti (*evidence-based evaluation*). Dengan adanya penggunaan data statistik, proses evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai capaian pembangunan daerah.

Analisis Faktor Pendukung Pencapaian

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Daerah, yang mendorong pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar evaluasi pembangunan.
2. Koordinasi dan pembinaan statistik sektoral kepada Perangkat Daerah, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan data dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan.
3. Ketersediaan sistem informasi dan portal data daerah, yang memudahkan perangkat daerah dalam memperoleh data statistik yang diperlukan untuk kegiatan evaluasi pembangunan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, khususnya dalam pengelolaan dan analisis data statistik untuk mendukung evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

Perbandingan dengan Target Nasional dan Provinsi

Jika dibandingkan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi, capaian indikator ini juga telah selaras dengan kebijakan pemerintah

dalam memperkuat pengelolaan data statistik sektoral dan perencanaan pembangunan berbasis data.

1. Tingkat Nasional
Pemerintah pusat melalui kebijakan Satu Data Indonesia mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memanfaatkan data statistik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
2. Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan statistik sektoral dan integrasi data pembangunan daerah melalui implementasi kebijakan Satu Data Provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Dengan capaian 100%, kinerja indikator ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat nasional maupun Provinsi NTB.

Tantangan dan Upaya Peningkatan

Meskipun capaian indikator telah mencapai target maksimal, beberapa hal masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah, antara lain:

- Peningkatan kualitas dan konsistensi data statistik sektoral agar data yang digunakan dalam evaluasi benar-benar valid dan mutakhir.
- Penguatan integrasi sistem data antar perangkat daerah sehingga data dapat dimanfaatkan secara lebih terpadu dalam proses evaluasi pembangunan.
- Peningkatan kapasitas analisis data di perangkat daerah agar data statistik tidak hanya digunakan sebagai informasi dasar, tetapi juga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Dengan upaya tersebut diharapkan pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah tidak hanya memenuhi target indikator secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

4. Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, indikator Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal. Keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi, termasuk penyusunan regulasi internal terkait pengelolaan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi, seperti pengamanan jaringan, server, dan sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah.
3. Peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia, melalui sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
4. Koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam penerapan standar keamanan informasi serta penguatan pengelolaan keamanan sistem informasi pemerintah daerah.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator yang mencapai 100% menunjukkan bahwa tingkat keamanan informasi pemerintah daerah telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, khususnya dalam era digitalisasi pelayanan publik.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan dalam pengelolaan keamanan informasi juga semakin kompleks. Ancaman terhadap sistem informasi, seperti serangan siber, kebocoran data, maupun gangguan terhadap sistem layanan elektronik, menjadi hal yang perlu terus diantisipasi.

Upaya Peningkatan dan Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan tata kelola keamanan informasi, termasuk penerapan standar keamanan informasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Peningkatan pengamanan infrastruktur teknologi informasi, melalui pemutakhiran sistem keamanan jaringan, server, dan aplikasi.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk memastikan sistem keamanan informasi berjalan secara optimal dan mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman siber.

Dengan upaya tersebut diharapkan tingkat keamanan informasi pemerintah daerah dapat terus terjaga serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan terpercaya.

Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis

Table 3.3.1

Tujuan	Rata-Rata Capaian Sasaran		Kriteria Capaian Sasaran	Rata-Rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-rata Capaian Tujuan Tahun sebelumnya 2025	
1 Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	1	Indeks SPBE	100%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	100%
	2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	100%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	100%
	3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	100%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	100%
	4	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.	100%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	100%
Rata-rata Total		100%	Baik	100%	Sangat Tinggi	100%	

Tabel 3.3.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja	% Kinerja	Program	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Keuangan
1	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	2,7	3,04	100%	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.535.976.094	1.531.333.100	99,70
							PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.280.082.256	2.240.914.800	98,28
		Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.828.833	72.581.100	94,47
		Meningkatnya tata kelola persandian dan keamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.149.818	39.818.900	79,40

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai persentase rata-rata sebesar 100% dilaksanakan melalui 4 Program dengan realisasi keuangan sebesar 92,96%. Dari perbandingan tersebut maka diketahui bahwa terdapat **efisiensi** penggunaan sumberdaya dalam mencapai target.

Efisiensi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi bersumber dari honorarium PPK merangkap Pengguna Anggaran yang tidak diperbolehkan menerima honorarium sesuai kebijakan daerah
2. Anggaran SPPD sudah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di tahun 2025 sehingga masih ada anggaran tersisa
3. Anggaran BBM untuk pejabat fungsional sudah tidak boleh dibayarkan lagi karena mereka sudah mendapatkan tunjangan fungsional sendiri.
4. Ada salah satu media yang tidak mengajukan invoice pembayaran.
5. Ada kegiatan Konferensi pers yang tidak membutuhkan biaya konsumsi dikarenakan kegiatannya hanya sebentar.
6. Tidak semua fitur atau layanan yang awalnya direncanakan jadi digunakan, sehingga pemilihan paket yang lebih rendah dari anggaran awal menghasilkan penghematan.
7. Penyedia jasa yang dipilih memberikan penawaran harga yang lebih rendah dari perkiraan anggaran awal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
8. Sisa uang sppd tidak mencukupi untuk melaksanakan undangan bimtek sehingga tidak dipergunakan, hal ini dikarenakan untuk pengajuan uang SPPDnya dengan tujuan Jakarta sedangkan kegiatan Bimteknya dilakukan di Makasar sehingga uang SPPD tidak mencukupi.

4. Analisis Program Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, ada 4 program yang mendukung tujuan tersebut, berikut Adalah analisis masing – masing program dalam menunjang keberhasilan untuk mencapai target yang sudah di tetapkan

I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital serta mendorong integrasi sistem informasi di lingkungan perangkat daerah.

Pada tahun berjalan, capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,04 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan melalui program pengelolaan aplikasi informatika yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung pencapaian nilai SPBE antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Pemerintahan

Dinas Kominfo melakukan pengembangan serta pengelolaan berbagai aplikasi pemerintahan yang digunakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta mempercepat proses layanan kepada masyarakat.

2. Integrasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Upaya integrasi berbagai sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah terus dilakukan agar data dan informasi dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Integrasi sistem ini mendukung penerapan konsep Satu Data Daerah, sehingga data yang digunakan oleh perangkat daerah menjadi lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan.

3. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung operasional aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo juga melakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi seperti pengelolaan server, jaringan internet pemerintah daerah, serta pusat data yang digunakan untuk menjalankan berbagai sistem aplikasi pemerintahan.

4. Pengelolaan Website dan Layanan Digital Pemerintah

Dinas Kominfo juga melakukan pengelolaan dan pengembangan website resmi pemerintah daerah serta website perangkat daerah sebagai sarana penyediaan informasi publik dan layanan digital kepada masyarakat. Keberadaan website pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian layanan berbasis elektronik dalam SPBE.

5. Pembinaan dan Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi oleh Perangkat Daerah

Dinas Kominfo secara aktif melakukan pembinaan serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan

dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Analisis Kontribusi terhadap Pencapaian Indeks SPBE

Pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada aspek layanan berbasis elektronik, tata kelola teknologi informasi, serta integrasi sistem informasi pemerintahan.

Dengan adanya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, integrasi sistem informasi serta penguatan infrastruktur teknologi informasi turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital secara lebih optimal.

Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui penerapan tata kelola persandian yang baik. Melalui penguatan pengamanan sistem informasi, pengelolaan jaringan komunikasi sandi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan instansi pembina persandian, tingkat keamanan informasi pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik. Ke depan, upaya penguatan sistem keamanan informasi, peningkatan integrasi pengamanan sistem teknologi informasi, serta pengembangan kapasitas aparatur di bidang keamanan informasi perlu terus dilakukan agar pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah semakin andal, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di era digital.

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu program strategis dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini berperan penting dalam memastikan tersedianya informasi pemerintahan yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun berjalan, Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah mencapai nilai 3,04, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

yang berfokus pada penyediaan layanan informasi pemerintah secara digital serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung pencapaian nilai SPBE melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah

Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pembaruan konten website resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta website perangkat daerah sebagai media utama penyampaian informasi publik. Website tersebut menjadi sarana penting dalam menyediakan informasi kebijakan, program pembangunan daerah, serta berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat secara daring.

2. Diseminasi Informasi Pemerintah Melalui Media Digital

Penyebarluasan informasi terkait program pembangunan daerah, kegiatan pemerintah, serta berbagai kebijakan publik dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah daerah seperti Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya. Pemanfaatan media digital ini mendukung penyampaian informasi secara cepat, luas, dan efektif kepada masyarakat.

3. Penguatan Layanan Informasi Publik

Dinas Kominfo juga berperan dalam memfasilitasi penyediaan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Pengembangan Komunikasi Publik Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan dokumentasi, publikasi, serta penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui berbagai kanal komunikasi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan daerah serta memperkuat partisipasi publik.

5. Pemanfaatan Layanan Pengaduan dan Informasi Publik

Dinas Kominfo juga mendukung pengelolaan berbagai kanal layanan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan terkait pelayanan publik secara lebih mudah dan cepat.

Analisis Kontribusi terhadap Pencapaian Indeks SPBE

Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada aspek layanan publik berbasis elektronik, transparansi informasi pemerintah, serta komunikasi digital pemerintah dengan masyarakat.

Pemanfaatan berbagai media digital dalam penyampaian informasi publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Selain itu, ketersediaan informasi publik secara daring juga meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan

Secara umum, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target Indeks SPBE sebesar 3,04. Melalui pengelolaan website pemerintah daerah, diseminasi informasi melalui media digital, penguatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan komunikasi publik pemerintah, implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Tengah dapat berjalan dengan baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik, penguatan integrasi kanal komunikasi pemerintah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian informasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program ini juga sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang lebih baik dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah berperan sebagai wali data daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah. Melalui program ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh

perangkat daerah dapat dikelola secara terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pembinaan Statistik Sektoral kepada Perangkat Daerah

Dinas Kominfo secara aktif melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, serta pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya pengelolaan data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih standar dan berkualitas.

2. Penguatan Implementasi Satu Data Daerah

Dalam rangka mendukung integrasi data pembangunan daerah, Dinas Kominfo mendorong implementasi Satu Data Daerah melalui penyusunan standar data, metadata, serta mekanisme pengelolaan data antar perangkat daerah. Dengan adanya integrasi data tersebut, data yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat digunakan secara bersama dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Portal Data Daerah

Dinas Kominfo juga mengembangkan dan mengelola portal data daerah sebagai sarana penyediaan data statistik sektoral yang dapat diakses oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Portal data ini menjadi media penting dalam menyediakan data yang lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

4. Validasi dan Sinkronisasi Data Statistik

Untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, Dinas Kominfo melakukan proses validasi, verifikasi, serta sinkronisasi data statistik sektoral yang dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait dan instansi pembina statistik, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pembangunan daerah memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Data

Dinas Kominfo juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan pengelolaan data statistik sektoral. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola, mengolah, dan memanfaatkan data statistik secara lebih efektif.

Analisis Kontribusi terhadap Peningkatan Pengelolaan Data Statistik

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Melalui koordinasi pengelolaan data, penguatan implementasi Satu Data Daerah, serta pengembangan portal data daerah, pengelolaan data statistik menjadi lebih terintegrasi, terstandar, dan mudah diakses oleh perangkat daerah.

Ketersediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi juga memberikan manfaat penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, monitoring pelaksanaan program, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data yang valid dan terpercaya.

Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan meningkatnya pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi. Melalui koordinasi statistik sektoral, penguatan implementasi Satu Data Daerah, pengembangan portal data daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas pengelolaan data statistik daerah terus mengalami peningkatan. Ke depan, upaya penguatan integrasi data antar perangkat daerah, peningkatan kualitas metadata dan standar data, serta optimalisasi pemanfaatan portal data daerah perlu terus dilakukan agar pengelolaan data statistik daerah dapat semakin mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data (*data-driven policy*).

IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendukung terciptanya sistem pengamanan informasi pemerintah daerah yang andal dan terpercaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi melalui penerapan tata kelola persandian yang baik, sehingga informasi strategis pemerintah daerah dapat terlindungi dari berbagai potensi ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam era digitalisasi pemerintahan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program persandian menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

Beberapa kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

Dinas Kominfo melaksanakan pengelolaan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah sebagai sarana pengamanan komunikasi kedinasan yang bersifat strategis. Melalui pengelolaan jaringan komunikasi sandi tersebut, proses pertukaran informasi penting antar instansi pemerintah dapat dilakukan secara lebih aman dan terlindungi.

2. Penerapan Pengamanan Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Upaya pengamanan informasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengamanan pada infrastruktur teknologi informasi, seperti pengamanan jaringan, server, serta sistem aplikasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan sistem, seperti serangan siber, kebocoran data, maupun penyalahgunaan akses terhadap sistem informasi pemerintah.

3. Koordinasi dengan Lembaga Persandian Nasional

Dinas Kominfo juga melakukan koordinasi dengan instansi pembina persandian, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan persandian di daerah. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pembinaan, konsultasi teknis, serta penerapan standar keamanan informasi yang sesuai dengan kebijakan nasional.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Persandian

Dalam mendukung pengelolaan keamanan informasi yang lebih baik, Dinas Kominfo juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola persandian, melalui pelatihan, sosialisasi, maupun kegiatan pembinaan terkait pengamanan informasi dan pengelolaan sistem keamanan informasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi

Dinas Kominfo secara berkala melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keamanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengamanan informasi yang telah

diterapkan dapat berjalan dengan baik serta mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman keamanan informasi.

Analisis Kontribusi terhadap Peningkatan Keamanan Informasi

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Melalui pengelolaan jaringan komunikasi sandi, penguatan pengamanan sistem teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

Selain itu, koordinasi dengan instansi pembina persandian nasional juga membantu pemerintah daerah dalam menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai dengan kebijakan nasional, sehingga sistem pengamanan informasi yang diterapkan dapat lebih efektif dalam melindungi informasi pemerintah daerah.

Kesimpulan

Secara umum, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui penerapan tata kelola persandian yang baik. Melalui penguatan pengamanan sistem informasi, pengelolaan jaringan komunikasi sandi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan instansi pembina persandian, tingkat keamanan informasi pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik. Ke depan, upaya penguatan sistem keamanan informasi, peningkatan integrasi pengamanan sistem teknologi informasi, serta pengembangan kapasitas aparatur di bidang keamanan informasi perlu terus dilakukan agar pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah semakin andal, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di era digital.

5. Akuntabilitas Keuangan

Berikut adalah pencapaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6.
Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase	Unit Kerja yang melaksanakan program/kegiatan	
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Operasi					Belanja Modal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.691.725	59.691.725	49.937.340	83,66	Sekretariat	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.291.682.916,92			3.291.682.916,92	3.291.682.916,92	3.255.377.812	98,90	Sekretariat	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.744.143	378.526.142	470.100,285	456.905.101	97,19	Sekretariat
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					111.023.304	111.023.304	108.765.000	97,97	Sekretariat
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				290.215.536		290.215.536	184.491.500	63,57	Sekretariat
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.941.020		125.941.020	108.341.633	86,03	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.535.976.094		1.535.976.094	1.531.333.100	99,70	Bidang PIKP
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.811,494,600	468,587,656	2.280.082.256	2.240.914.800		Bidang APTIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				62,060,833	14.768.000	76.828.833	72.581.100	94,47	Bidang Statistik dan Sandi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.579.868,96	24.569.950	50.149.818,96	39.818.900	79,40	Bidang Statistik dan Sandi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan dalam mencapai sebagian besar target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Beberapa capaian kinerja utama yang berhasil dicapai antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai nilai 3,04 dengan kategori Baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah mencapai 100%.
3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah mencapai 100%.
4. Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan data statistik sektoral, penguatan komunikasi publik, serta pengamanan informasi pemerintah daerah telah berjalan secara optimal.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, dukungan pimpinan daerah, koordinasi dengan perangkat daerah, serta komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara profesional dan akuntabel.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan, penguatan keamanan informasi di tengah meningkatnya ancaman siber, serta peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Langkah Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah akan terus melakukan berbagai langkah strategis yang diarahkan untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penguatan arsitektur SPBE, integrasi sistem aplikasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
- 2) Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, termasuk penguatan jaringan komunikasi data, pusat data pemerintah daerah, serta sistem pengamanan jaringan dan informasi.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral daerah melalui penguatan implementasi kebijakan Satu Data Daerah, peningkatan kualitas standar data dan metadata, serta optimalisasi pemanfaatan portal data daerah.
- 4) Memperkuat tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah, melalui peningkatan kapasitas aparatur persandian, penguatan sistem keamanan informasi, serta penerapan standar keamanan informasi secara berkelanjutan.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

- 6) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, guna mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, 30 Januari 2026

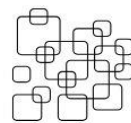
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**





LAMPIRAN

- ◆▶ **CASCADING & POHON KINERJA**
- ◆▶ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- ◆▶ **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**
- ◆▶ **PRESTASI/PENGHARGAAN DISKOMINFO TAHUN 2025**
- ◆▶ **MATRIKS HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DISKOMINFO TAHUN 2025**



www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id



CASCADING DISKOMINFO KAB. LOMBOK TENGAH

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2025



VGI	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERHIMA, SAKHTERA, BERWISATA, WADU dan BERBUDAYA (BERKAITU JAYA)						
MISI II	Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mutakhir, Cepat dan Bersih						
Sasaran KPNPD	Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima serta Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal						
Tujuan OPD (Sasaran II)	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan						
Indikator Tujuan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan-pertukaran antara nilai indeks domain dan bobot domain	1	2	3	4	5
			1,78	2,3	2,55	2,7	3,13

Sasaran (Sasaran II) : Meningkatkan Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	Nilai Indeks Domain (ND) kali Bobot Domain (BD)%	1	2	3	4	5
Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	Nilai Indeks Domain (ND) kali Bobot Domain (BD)%	1,30	1,80	2,00	2,10	2,50
Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	Nilai Indeks Domain (ND) kali Bobot Domain (BD)%	1,00	1,30	1,60	1,90	2,30
Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	Nilai Indeks Domain (ND) kali Bobot Domain (BD)%	2,00	3,30	3,60	3,90	4,00

Sasaran (Sasaran II) : Meningkatkan Pengambilan Data Statistik Sektor Yang Akurat dan Terintegrasi							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Presentase Perangkat Datasah (PDS) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	100	100	100	100	100
Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	100	100	100	100	100

Sasaran (Sasaran II) : Meningkatkan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi							
Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Presentase Tingkat Keamanan Informasi	%	Jumlah Pengamanan Informasi Daerah / Jumlah Pengamanan Informasi yang harus dilakukan dikalikan 100%	100	100	100	100	100

Program 1 (Sasaran II) Subdivisi (Bidang) : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Loka							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Nilai SAKIP OPD	Produk	Nilai SAKIP	8	8	8	8	8

Program 2 (Sasaran II) Bidang Pengambilan Informasi dan Komunikasi Publik : Program Pengambilan Informasi dan Komunikasi Publik							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Presentase OPD yang menggunakan E-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	Jumlah OPD yang menggunakan E-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100	78,18	83,63	89,08	94,53	100,00

Program 3 (Sasaran II) Bidang Aplikasi dan Informatika : Program Pengambilan Aplikasi Informatika							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Presentase OPD yang melakukan pelayanan publik secara online	%	Jumlah OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00

Program 4 (Sasaran II) Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik : Program Penyelenggaraan Statistik Sektor							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Jumlah instansi yang melaksanakan urusan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	Jumlah instansi dengan urusan Lombok Tengah Satu Data	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Program 5 (Sasaran II) Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik : Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi							
Indikator Program	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Presentase Informasi daerah yang diamankan	%	Jumlah informasi daerah yang diamankan dibagi jumlah seluruh informasi daerah yang harus diamankan dikali 100	100	100	100	100	100

Ekselon IV: Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Kegiatan 1: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Presentase RU OPD yang Tersepat	%	Capaian RU dibagi dengan target RU dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 2: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Presentase Terasa Hasil Pemantauan Anggaran OPD yang di-Sinkronisasi	%	Jumlah terasaha hasil pemantauan anggaran yang di-Sinkronisasi dibagi dengan jumlah terasaha dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 3: Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Presentase Penyelidikan Pekerjaan sesuai SOP	%	Jumlah penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Kegiatan Pengambilan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase Validasi Data Asset OPD	%	Jumlah data asset yang divalidasi dibagi dengan jumlah data asset dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 5: Kegiatan Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase Penyelidikan Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	%	Jumlah pekerjaan sesuai SOP yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 6: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Presentase BMD Kondisi Baik	%	Jumlah BMD dengan kondisi baik dibagi dengan jumlah BMD dikalikan 100	100	100	100	100	100

Ekselon III: Bidang Pengambilan Informasi dan Komunikasi Publik							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Kegiatan 1: Kegiatan Pengambilan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Loka							
Jumlah PPO (OPD, Desa, Sekolah, Puskesmas) yang aktif melaksanakan dieministrasi informasi	PPO	Jumlah PPO yang aktif melaksanakan dieministrasi informasi	81	101	125	153	183

Ekselon III: Bidang Aplikasi dan Informatika							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Kegiatan 1: Kegiatan Pengambilan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Loka							
Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi	Aplikasi	Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi	2	1	1	1	1

Ekselon III: Bidang Aplikasi dan Informatika							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Kegiatan 1: Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Daerah Kabupaten/Loka							
1. Buku Saku Statistik	Dokumentasi	Jumlah Jenis Buku Yang di Otak	3	3	3	3	3
2. Buku Lombok Tengah Dalam Data	Dokumentasi	Jumlah Jenis Buku Yang di Otak	3	3	3	3	3
3. Buku Keamatan Dalam Data	Dokumentasi	Jumlah Jenis Buku Yang di Otak	3	3	3	3	3

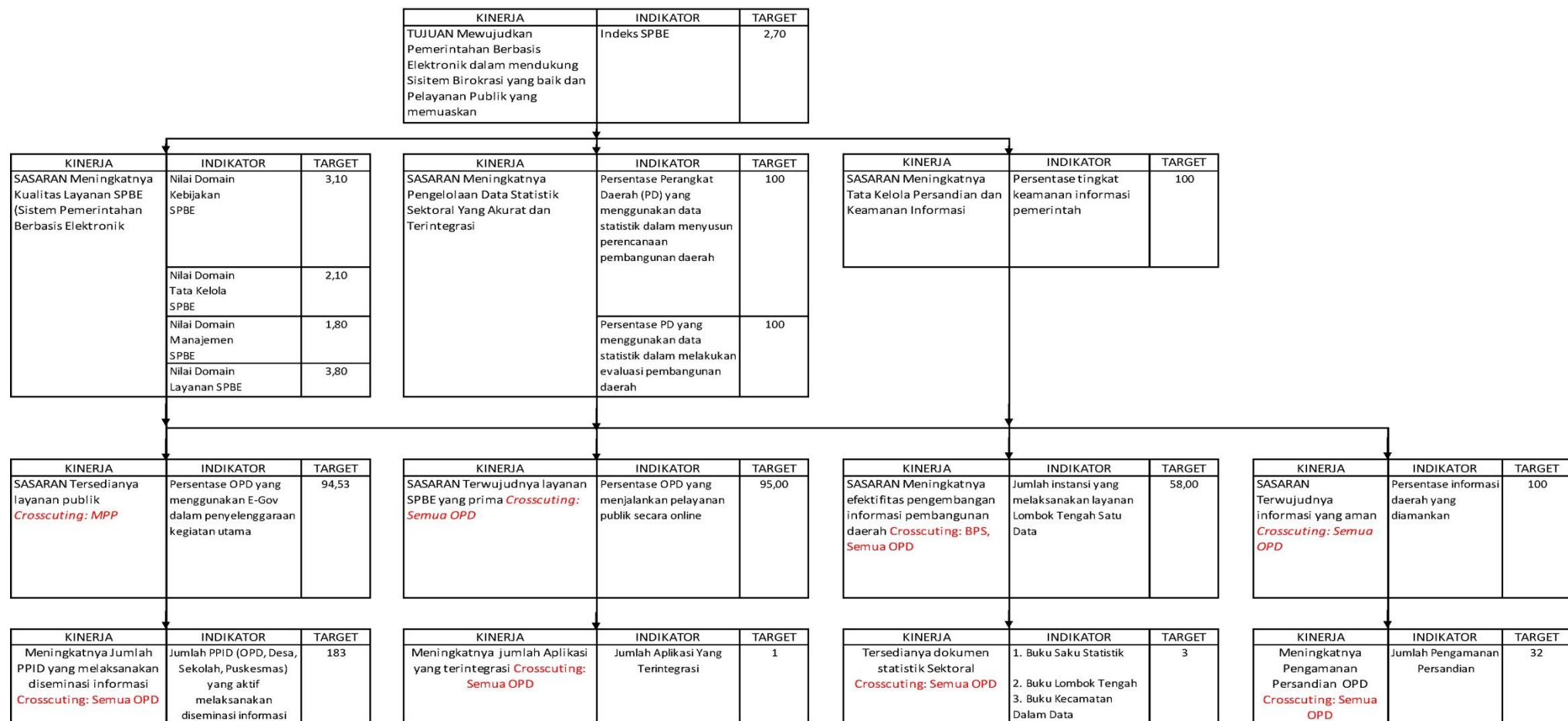
Ekselon IV: Kepala Seksi Persandian							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formula	Target Tahun Ke-				
Kegiatan 1: Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Loka							
Jumlah Pengamanan Persandian	OPD	Jumlah Pengamanan Persandian pada OPD	32	32	32	32	32

Proy. 24 Januari 2025
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Lombok Tengah,

 Drs. H. Muhajad
 Pembina Utama Muda (B/C)
 NIP. 19651211198031209

POHON KINERJA DISKOMINFO KAB. LOMBOK TENGAH

POHON KINERJA (LOGIC MODEL)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025



Praya, 24 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. Muhamad
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512311989031209

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LOMBOK TENGAH

Tahun

2025

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Raden Pугuh Praya
Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai 3

www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id, Email: diskominfo@lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
5. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
10. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

12. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan;
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan tercapainya IKU adalah :

- a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup penetapan IKU adalah IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 4

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarannya;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 5

- 1) Penetapan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.
- 2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah paling sedikit memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.
- 3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan

c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 24 Januari 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH,


Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 24 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

1. INSTANSI : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
2. VISI KABUPATEN : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju Dan Berbudaya (Bersatu Jaya)
3. MISI RPJMD : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
4. TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
5. FUNGSI :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan		TARGET					
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Indeks ini dinilai berdasarkan komponen-komponen utama yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).	<p>Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 :</p> <p>INDEKS SPBE = $\sum ND_j \times BD_j$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j $\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{BD_i} \sum N_{Ai} \times B_{Ai}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BDi = Bobot Domain ke-i - NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAi = Bobot Aspek ke-i $\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{BA_k} \sum N_{ik} \times B_{ik}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAK = Nilai Bobot Aspek ke-k - NIK = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BIK = Nilai Bobot indikator ke-k 	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,65	1,78	2,30	2,55	2,70	3,13
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra).	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk evaluasi dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam melindungi kerahasiaan,	Jumlah Komponen Keamanan Informasi yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan Informasi yang dinilai di kali 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100

				integritas, dan ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup audit keamanan, implementasi kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko informasi									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berikut adalah penjelasan untuk tabel indikator kinerja yang disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Waktu	Keterangan
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks SPBE	Nilai	2021-2026	Mengacu pada Indeks SPBE Nasional
Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik	Meningkatkan persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Persentase (%)	2021-2026	Mengacu pada jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik
Meningkatkan Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase komponen keamanan informasi yang memenuhi standar	Persentase (%)	2021-2026	Mengacu pada audit keamanan informasi yang dilakukan

1. Tujuan:

- Menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam tabel ini, tujuan mencakup:
 - Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
 - Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral.
 - Meningkatkan tata kelola keamanan informasi.

2. Sasaran Strategis:

- Sasaran spesifik yang mendukung pencapaian tujuan. Setiap sasaran strategis terfokus pada hal yang lebih terukur, misalnya:
 - Meningkatkan kualitas layanan SPBE untuk tujuan pemerintahan berbasis elektronik.
 - Meningkatkan perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - Meningkatkan keamanan informasi untuk melindungi data pemerintahan.

3. Indikator Kinerja:

- Menyatakan ukuran keberhasilan yang spesifik dan terukur. Contohnya:
 - Nilai Indeks SPBE, yang mengukur kualitas implementasi SPBE.
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sebagai ukuran tingkat adopsi data dalam perencanaan.
 - Persentase komponen keamanan informasi yang memenuhi standar, yang menunjukkan tingkat keamanan informasi pemerintahan.

4. Satuan:

- Unit yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja. Dalam hal ini, ada dua jenis satuan: nilai (untuk indeks SPBE) dan persentase (untuk indikator lainnya).

5. Target Waktu:

- Memberikan batas waktu pencapaian sasaran yang realistis dan relevan. Semua target diarahkan untuk dicapai selama periode 2021-2026.

6. Keterangan:

- Memberikan konteks tambahan tentang bagaimana indikator diukur atau dipahami. Penjelasan ini membantu dalam memastikan indikator tersebut relevan dengan tujuan organisasi:
 - Indeks SPBE diukur berdasarkan standar nasional.
 - Persentase perangkat daerah dihitung dari jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik.
 - Persentase keamanan informasi dinilai melalui audit dan penerapan standar keamanan informasi.

Prinsip SMART dalam Tabel Ini :

- **Specific (Spesifik):** Indikator dan sasaran sangat spesifik, misalnya "Nilai Indeks SPBE" atau "Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik."
- **Measurable (Terukur):** Setiap indikator memiliki satuan dan metode pengukuran yang jelas, seperti nilai atau persentase.
- **Achievable (Dapat Dicapai):** Target yang ditetapkan (misalnya, untuk 2021-2026) disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan organisasi.
- **Relevant (Relevan):** Indikator langsung berkaitan dengan tujuan strategis organisasi, seperti meningkatkan tata kelola data dan keamanan informasi.
- **Time-bound (Berbatas Waktu):** Target waktu pencapaian telah ditentukan dengan jelas (2021-2026).

Demikian, tabel ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan kinerja organisasi secara berkala.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KAB. LOMBOK TENGAH,



Drs. H. MUHAMAD

196512311989031209

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,7
	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,00
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,00
	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,60
	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3,60
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100



Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. H. Muhamad

NIP. 19651231 198903 1 209









Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKIPD yang dievaluasi (%) (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2026) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal																											
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	94.53 %	5.390.550,000	%	1.438.624,500	94.53 %	Rp.1.439.883,000	100 %	Rp.422.717,100	100 %	Rp.420.324,600	100 %	Rp.325.955,400	100 %	Rp.362.336,000	100 %	Rp.1.531.333,100	100 %	100	Rp. 100	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi	28 PPID	Rp.5.390.550,000	PPID	Rp.1.438.624,500	110 PPID	Rp.1.535.976,094	0 PPID	Rp.422.717,100	0 PPID	Rp.420.324,600	28 PPID	Rp.325.955,400	65 PPID	Rp.362.336,000	29 PPID	Rp.1.531.333,100	26 %	100 %	0	Rp.2.969.957,600	0	55%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																											
85%																											
100%																											
Predikat Kinerja																											
Tinggi																											
Sangat Tinggi																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B %	14.968.544,699	%	3.188.745,025	B %	Rp.5.464.331,412	B %	Rp.1.065.364,858	B %	Rp.1.081.280,116	B %	Rp.956.031,461	B %	Rp.1.061.141,951	B %	Rp.4.163.818,386	B %	B	Rp. 83	B %	0			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	1 Dokumen	Rp.13.556,104,113	Dokumen	Rp.2.944,278,329	2 Dokumen	Rp.3.291,682,916	0 Dokumen	Rp.831.960,545	0 Dokumen	Rp.841.802,266	1 Dokumen	Rp.751,675,240	1 Dokumen	Rp.829,939,761	2 Dokumen	Rp.3.255,377,812	100 %	99 %	0	Rp.6.199,656,141	0	46%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan administrasi umum PD	1 Dokumen	Rp.436,230,320	Dokumen	Rp.235,059,296	1 Dokumen	Rp.470,100,285	0 Dokumen	Rp.108,355,101	0 Dokumen	Rp.137,453,000	1 Dokumen	Rp.49,440,000	0 Dokumen	Rp.161,657,000	2 Dokumen	Rp.456,905,101	200 %	97 %	0	Rp.691,964,397	0	159%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	2 Jenis	Rp.187,381,356	Jenis	Rp.0	2 Jenis	Rp.125,941,020	0 Jenis	Rp.37,334,872	0 Jenis	Rp.25,279,850	1 Jenis	Rp.21,908,721	1 Jenis	Rp.23,818,190	2 Jenis	Rp.108,341,633	100 %	86 %	0	Rp.108,341,633	0	0		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Tercatat	2 Jenis	Rp.189,594,192	Jenis		2 Jenis	Rp.761,023,304	0 Jenis	Rp.10,646,000	0 Jenis	Rp.0	2 Jenis	Rp.93,139,000	0 Jenis	Rp.4,980,000	3 Jenis	Rp.108,765,000	150 %	14 %	0	Rp.108,765,000	0			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	Rp.433,523,235	Bulan		14 Bulan	Rp.290,215,536	0 Bulan	Rp.66,342,000	0 Bulan	Rp.66,627,000	9 Bulan	Rp.25,115,000	5 Bulan	Rp.26,407,500	10 Bulan	Rp.184,491,500	71 %	64 %	0	Rp.184,491,500	0			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	Rp.165,711,483	Dokumen	Rp.9,407,400	9 Dokumen	Rp.59,691,725	0 Dokumen	Rp.10,726,340	0 Dokumen	Rp.10,118,000	7 Dokumen	Rp.14,753,500	2 Dokumen	Rp.14,339,500	8 Dokumen	Rp.49,937,340	89 %	84 %	0	Rp.59,344,740	0	36%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																											
100%																											
83%																											
Predikat Kinerja																											
Sangat Tinggi																											
Tinggi																											
Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima																											
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	95 %	720.000,000	%	0	95 %	Rp.2.306,688,366	100 %	Rp.122.300,300	100 %	Rp.1.214,244,000	100 %	Rp.630,946,500	100 %	Rp.273,424,000	100 %	Rp.2.240,914,800	100 %	100	Rp. 98	100 %	0			
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	1 Aplikasi	Rp.720,000,000	Aplikasi	Rp.0	3 Aplikasi	Rp.2.280,082,256	0 Aplikasi	Rp.122.300,300	0 Aplikasi	Rp.1.214,244,000	1 Aplikasi	Rp.630,946,500	2 Aplikasi	Rp.273,424,000	2 Aplikasi	Rp.2.240,914,800	67 %	98 %	0	Rp.2.240,914,800	0	0		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																											
100%																											
98%																											
Predikat Kinerja																											
Sangat Tinggi																											
Sangat Tinggi																											
Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal																											
		PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORIAL	Jumlah Instansi yang melaksanakan layanan publik Tengah Satu Data	58 Instansi	197,167,418	Instansi		45 Instansi	Rp.162,636,133	45 Instansi	Rp.9,770,000	45 Instansi	Rp.17,722,100	45 Instansi	Rp.9,930,000	45 Instansi	Rp.35,159,000	45 Instansi	Rp.72,581,100	45 Instansi	45	Rp. 94	45 Instansi	0			
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Buku saku statistik, Buku lombok tengah dalam data, Buku kecamatan dalam data	3 Dokumen	Rp.197,167,418	Dokumen		3 Dokumen	Rp.76,828,833	0 Dokumen	Rp.9,770,000	0 Dokumen	Rp.17,722,100	0 Dokumen	Rp.9,930,000	3 Dokumen	Rp.35,159,000	1 Dokumen	Rp.72,581,100	33 %	94 %	0	Rp.72,581,100	0			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																											
100%																											
94%																											
Predikat Kinerja																											
Sangat Tinggi																											
Sangat Tinggi																											

Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima																											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase informasi daerah yang diamankan	100 %	87.074,020	%	107.096,020	100 %	Rp.125,359,250	100 %	Rp.0	100 %	Rp.15,332,500	100 %	Rp.2,427,800	100 %	Rp.22,058,600	100 %	Rp.39,818,900	100 %	100	Rp. 79	100 %	0				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan persandian (OPD)	32 OPD	Rp.87,074,020	OPD	Rp.107,096,020	32 OPD	Rp.50,149,818	0 OPD	Rp.0	0 OPD	Rp.15,332,500	32 OPD	Rp.2,427,800	0 OPD	Rp.22,058,600	33 OPD	Rp.39,818,900	103 %	79 %	0	Rp.146,914,920	0	169%			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																			100%	79%							
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																			97 %	90 %							
PREDIKAT KINERJA																			Sangat Tinggi	Tinggi							

SOP Penyusunan LKjip

Prosedur Penyusunan LKjip										
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag/ kasie	Kabid	Sekretaris	Kadis Kominfo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan LKjip.						Penstra, RKA, DPA, PK, dan realisasi keuangan selama setahun.	1 Hari	Bahan Pendukung LKjip	
2	Melakukan koordinasi dengan para Kasubag / Kasubid dan Kabid untuk penyusunan LKjip.						Bahan pendukung LKjip	1 Hari	Bahan Pendukung LKjip	
3	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pencapaian-pencapaian sasaran rencana strategis, target Rencana Kerja SKDP, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) SKDP, Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang sesuai dengan bidang kerja SKDP. Menghimpun data dari bidang dan mensinkronkan dengan data keuangan lanjut. Menyusun realisasi masing-masing kegiatan yang sudah berjalan selama setahun lengkap dengan alasan apabila ada realisasi yang kurang dari 70% dari anggaran yang tersedia dan menentukan solusi dan saran untuk 					<ul style="list-style-type: none"> Penstra, Renja, DPA, PK, dan realisasi keuangan selama setahun 	4 Hari	Draft Evaluasi Kegiatan SKPD		
4	Menyusun draft LKjip sesuai sistematika yang telah ditentukan.					Tidak	Draft Evaluasi Kegiatan SKPD	1 Hari	Draft LKjip	
5	Memeriksa draft LKjip lengkap dengan lampirannya.						• Soft Copy Usulan	20 Menit	Draft LKjip	
6	Memeriksa draft LKjip lengkap dengan lampirannya dan memberikan persetujuan / tanda tangan.						• Usulan Kegiatan Bidang	40 Menit	LKjip	SOP Surat Keluar
7	Mengirim LKjip kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.						LKjip	10 Menit	Arsip LKjip	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Raden Puguh - Praya, Gedung A, Lantai III, Pusat Pemerintahan Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat - Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR **02** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SKPD PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) dipandang perlu menunjuk Tim penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu bertugas mengumpulkan data-data serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja SKPD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 15 Januari 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Drs. H. MUHAMAD

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512311989031209

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Nomor : **02** Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	RIZKY EKA SETIA, A.Md. Pengelola Keuangan	Anggota
9.	YUANITA ROHMAYANTI, A.Md. Bendahara Pengeluaran	Anggota
10.	NURMAH, S.Kom. Analis Sistem Informasi	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

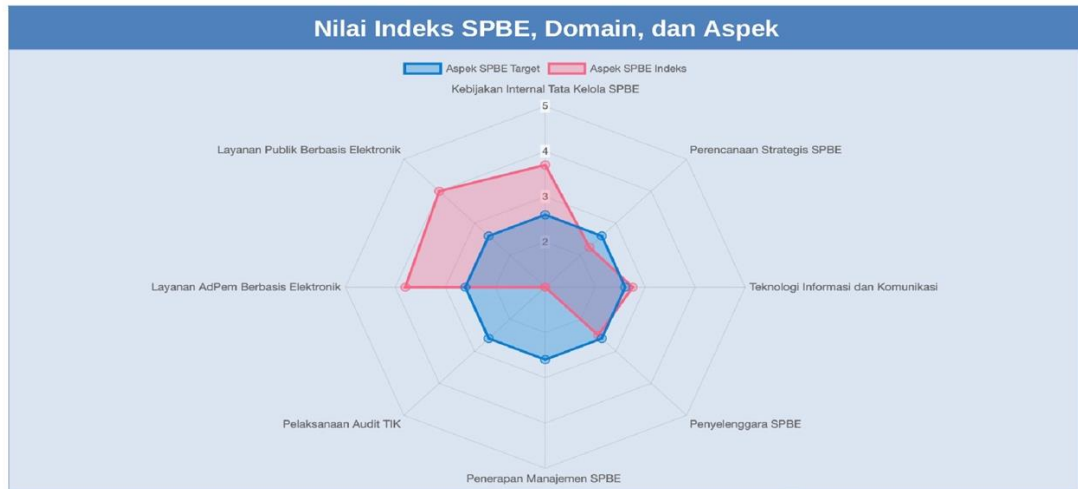
Drs. H. MUHAMAD
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.
196512311989031209

PRESTASI/PENGHARGAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

1. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meraih indeks SPBE dengan Predikat BAIK dan menempati urutan ke-5 di NTB

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	3,04 (Baik)
---	----------------



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,04
Domain Kebijakan SPBE	3,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Dalam laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih **indeks 3,04** dengan predikat **Baik**. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan SPBE sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Posisi dan Perbandingan

Kabupaten Lombok Tengah menempati **peringkat kelima** dari 11 pemerintah daerah yang dievaluasi di NTB. Berikut adalah peringkat dan indeks terkait:

1. **Pemerintah Provinsi NTB:** Indeks 3,56, predikat **Sangat Baik**.
2. **Pemerintah Kota Mataram:** Indeks 3,55, predikat **Sangat Baik**.
3. **Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat:** Indeks 3,45, predikat **Baik**.
4. **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:** Indeks 3,05, predikat **Baik**.
5. **Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah:** Indeks 3,04, predikat **Baik**.

Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengungguli beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan lainnya, meskipun masih berada di bawah Kabupaten Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya dalam hal implementasi SPBE.

Analisis dan Peluang

Dengan predikat **Baik**, Lombok Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Namun, untuk meningkatkan peringkatnya, beberapa langkah berikut dapat diprioritaskan:

1. **Penguatan Integrasi Sistem Informasi:** Memastikan keterpaduan data lintas OPD dan meminimalkan silo data.
2. **Pengembangan Infrastruktur Digital:** Memperluas jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik berbasis elektronik.
3. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Fokus pada aplikasi layanan publik yang user-friendly dan mudah diakses masyarakat.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan indeks SPBE dan predikat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat:

1. **Menambah Inovasi Digital:** Menerapkan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) atau blockchain untuk mendukung layanan administrasi dan pengelolaan data.

2. **Pelatihan Berkelanjutan untuk ASN:** Mengadakan pelatihan intensif tentang transformasi digital dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.
3. **Kolaborasi Regional:** Bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki indeks lebih tinggi untuk berbagi praktik terbaik.

Kesimpulan

Capaian indeks SPBE sebesar **3,04** dengan predikat **Baik** mencerminkan progres positif digitalisasi di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan peningkatan fokus pada integrasi sistem, infrastruktur digital, dan layanan publik, Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi di masa mendatang.

Keberhasilan penilaian SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, tim koordinasi SPBE, hingga masyarakat. Dengan terus mengembangkan inovasi dan menjaga komitmen terhadap digitalisasi, Lombok Tengah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

2. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



Foto 1: Foto Penyerahan Penghargaan Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih predikat Informatif, kategori tertinggi, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025. Pemkab Lombok Tengah memperoleh nilai 98,68, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah KIP NTB 2025 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (18/12/2025). Acara ini dihadiri Gubernur NTB H Lalu Muhammad Iqbal, Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Pemkab Lombok Tengah diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Muhammad.

**MATRIKS HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOMBOK TENGAH**

No	SASARAN RPJMD	PRIRITAS PEMBANGUNAN RKPd TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2025	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) OPD TAHUN 2025	PROGRAM / KEGIATAN OPD TAHUN 2025	ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung sistem birokrasi dan	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.	Indeks SPBE mencapai	2,7	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,280,082,256.
					Nilai Domain Kebijakan SPBE	3	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,535,976,094.
					Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2		
					Nilai Domain Manajemen SPBE	1,6		
					Nilai Domain Layanan SPBE	3,6		
			Meningkatkan pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76,828,833.	
				Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%			
			Meningkatkan keamanan informasi melalui tata kelola persandian yang baik.	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50,149,818.96	

PENJELASAN MATRIKS HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Analisis Dokumen Perencanaan

1. Sasaran RPJMD dan Prioritas RKPD

- **Sasaran RPJMD:** Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- **Prioritas RKPD:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan tata kelola berbasis elektronik.
- **Arah Kebijakan RKPD:** Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung sistem birokrasi dan pelayanan publik yang memuaskan.

2. Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD

- **Tujuan:**
 - Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik yang optimal.
 - Meningkatkan pengelolaan data statistik yang akurat dan terintegrasi.
 - Meningkatkan keamanan informasi melalui tata kelola persandian yang baik.
- **Sasaran:**
 - Indeks SPBE mencapai 2,7.
 - Seluruh OPD (100%) menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - Tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 100%.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks SPBE dengan nilai target: 2,7
- Persentase OPD yang menggunakan data statistik: 100%.
- Tingkat keamanan informasi pemerintah: 100%.

4. Program dan Anggaran

- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika:**
 - Anggaran: Rp 2.280.082.256.
- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:**
 - Anggaran: Rp 1.535.976.094.
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral:**
 - Anggaran: 76.828.833.
- **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi:**
 - Anggaran: Rp 50.149.818.

Penjelasan Laporan

1. **Konteks dan Relevansi** Dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 telah dirancang untuk mendukung target RPJMD dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah melalui implementasi SPBE. Fokus utama adalah pelayanan publik berbasis elektronik, pengelolaan data statistik yang efisien, dan penguatan keamanan informasi.

2. Strategi Pelaksanaan

- **SPBE sebagai Fokus Utama:** Dengan target indeks 2.7 , Diskominfo memprioritaskan peningkatan tata kelola dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung sistem birokrasi modern.
 - **Data Statistik sebagai Landasan Pembangunan:** Pemanfaatan data statistik oleh seluruh OPD menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti.
 - **Keamanan Informasi:** Pengelolaan persandian difokuskan untuk mencapai tingkat keamanan informasi pemerintah hingga 100%, melindungi data dari ancaman siber.
3. **Efisiensi Penggunaan Anggaran** Dengan alokasi anggaran sebesar lebih dari Rp 3,5 miliar, program-program Diskominfo dirancang untuk memberikan dampak signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Alokasi terbesar diberikan pada pengelolaan aplikasi informatika dan informasi publik.
4. **Peluang dan Tantangan**
- **Peluang:** Implementasi SPBE yang lebih matang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - **Tantangan:** Pemenuhan target indeks SPBE memerlukan kolaborasi lintas OPD serta penguatan infrastruktur dan SDM.

Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun program strategis yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan RKPD 2025. Fokus pada SPBE, pengelolaan data, dan keamanan informasi menunjukkan komitmen Diskominfo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Rekomendasi

1. **Penguatan SDM dan Infrastruktur:** Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk aparatur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.
2. **Monitoring Berkala:** Melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan pencapaian target IKU, khususnya indeks SPBE.
3. **Kolaborasi Antar-OPD:** Meningkatkan sinergi dengan OPD lain untuk optimalisasi program dan efisiensi anggaran.

Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program Diskominfo untuk tahun 2025 dan seterusnya.

Praya, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 196908151989031007